



Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Hilma Lathifah ¹⁾, Aldri Frinaldi ²⁾, Asnil ³⁾, Nora Eka Putri ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

Email: ¹⁾ hilmalathifah23@gmail.com ; ²⁾ aldri@fis.unp.ac.id ; ³⁾ asnilmelayu@gmail.com

; ⁴⁾ noraekaputri@fis.unp.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2024]

Revised [27 November 2024]

Accepted [02 Desember 2024]

KEYWORDS

Bureaucratic Accountability,
Regional Finance,
Public Service Performance

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas partisipatif dalam reformasi keuangan daerah, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Reformasi keuangan daerah di Indonesia difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan teknologi digital seperti e-budgeting, e-audit, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi elemen penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah yang telah menerapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan transparansi keuangan dan mendorong akuntabilitas pejabat publik, namun terdapat hambatan seperti kurangnya ruang komunikasi publik dan literasi digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat secara lebih inklusif serta penerapan teknologi informasi yang lebih luas. Dengan demikian, integrasi akuntabilitas partisipatif dan digitalisasi keuangan daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan keuangan daerah yang berorientasi pada transparansi dan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of participatory accountability in regional financial reform, especially in encouraging community involvement in regional budget oversight. Regional financial reform in Indonesia is focused on increasing transparency and accountability through the application of digital technology such as e-budgeting, e-audit, and the Regional Financial Information System (SIKD). Active community participation, both directly and indirectly, is an important element in ensuring effective and efficient use of the budget. This research uses qualitative methods with a case study approach in several regions that have implemented community participation in APBD supervision. The research results show that community involvement can increase financial transparency and encourage accountability of public officials, but there are obstacles such as a lack of public communication space and digital literacy. To overcome these obstacles, policies are needed that support more inclusive community involvement and wider application of information technology. Thus, the integration of participatory accountability and digitalization of regional finance is expected to strengthen more transparent and accountable financial governance, as well as increase public trust in regional governments. This research contributes to the development of regional financial policies that are oriented towards transparency and community participation.

PENDAHULUAN

Di era desentralisasi saat ini, akuntabilitas birokrasi publik menjadi isu sentral yang mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sistem keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Namun, meskipun ada kebebasan dalam pengelolaan, tantangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi masih sering dihadapi. Berbagai laporan mengenai penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, dan kurangnya pertanggungjawaban administratif kerap mencuat ke permukaan, mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melayani publik dengan baik. Masyarakat kini semakin kritis dan berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran yang telah dialokasikan dipergunakan, dan hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan peningkatan akuntabilitas dalam birokrasi publik. Salah satu permasalahan mendasar yang muncul adalah ketidakselarasan antara tujuan pengelolaan keuangan daerah dan realisasi kinerja pelayanan publik. Meskipun anggaran yang dialokasikan seharusnya mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, sering kali terlihat bahwa anggaran yang disusun tidak merespons kebutuhan riil di lapangan. Misalnya, alokasi dana untuk program-program sosial yang mendesak kerap kali lebih sedikit dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Ketidakjelasan dalam proses penganggaran dan

distribusi anggaran yang tidak merata sering menghambat implementasi program-program pelayanan publik yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada titik ini, penting untuk mencermati bagaimana proses penganggaran yang buruk dapat menyebabkan pelayanan publik yang tidak optimal, serta mengakibatkan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang mereka terima. Dampak dari rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berpengaruh pada proses administratif, tetapi juga langsung memengaruhi kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Ketidakpuasan publik terhadap pelayanan sering kali berakar dari kurangnya informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran. Masyarakat merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan mereka. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Penurunan tingkat kepercayaan publik ini merupakan masalah serius, karena masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah cenderung kurang berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan yang baik. Ketidakpuasan ini dapat terlihat dari berbagai survei yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan harapan mereka. Misalnya, dalam sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan untuk puskesmas sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan masyarakat. Di samping itu, program-program lain yang berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan sosial juga sering kali terabaikan. Masyarakat pun merasa bahwa anggaran yang mereka bayarkan melalui pajak tidak dikembalikan kepada mereka dalam bentuk layanan yang memadai. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan yang mendalam dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, serta penerapan prinsip akuntabilitas yang lebih ketat dalam setiap tahapan pengelolaan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, namun hasil yang diperoleh belum memuaskan. Sejumlah program reformasi administrasi dan keuangan yang digagas oleh pemerintah pusat sering kali tidak diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan komitmen dari aparat birokrasi daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung otoriter dan kurang terbuka terhadap kritik juga menjadi hambatan bagi upaya peningkatan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas birokrasi publik serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini.

Akhirnya, dalam konteks ini, akuntabilitas birokrasi publik harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi keuangan daerah. Dengan meningkatkan akuntabilitas, diharapkan kinerja pelayanan publik akan semakin baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih dan tumbuh. Penekanan pada akuntabilitas ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, setiap upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan sia-sia, karena masyarakat tidak akan percaya pada institusi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan akan diperoleh rekomendasi yang relevan bagi perbaikan sistem akuntabilitas di tingkat daerah. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya.

Melalui pendekatan yang sistematis dan analitis, diharapkan bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi publik di Indonesia. Dengan fokus pada permasalahan nyata yang dihadapi dalam sistem keuangan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan efektif di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencakup transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelaporan yang jelas, dan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat



terhadap pemerintah. Akuntabilitas yang baik juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang sering kali terjadi ketika pengawasan lemah.

Menurut Robert Klitgaard (1988), seorang ahli dalam studi pemerintahan dan korupsi, akuntabilitas sangat penting dalam memerangi korupsi. Ia menyatakan bahwa "korupsi terjadi ketika kekuasaan tidak dapat diawasi, dan akuntabilitas merupakan kunci untuk mengurangi kesempatan bagi tindakan korup." Dengan demikian, sistem akuntabilitas yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Keuangan daerah mencakup pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan transparan.

Ahli ekonomi daerah, Emil Salim (1997), menekankan pentingnya manajemen keuangan daerah yang baik. Ia menyatakan, "Keuangan daerah yang sehat dan transparan adalah fondasi bagi otonomi daerah yang efektif." Emil Salim mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan keuangan yang baik, otonomi daerah tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini mencakup berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Kualitas pelayanan publik dapat sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan citra pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, termasuk melalui inovasi dan penggunaan teknologi.

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1992), dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government*, pelayanan publik yang efektif harus berfokus pada hasil dan kepuasan pengguna. Mereka menyatakan, "Pemerintah harus berorientasi pada pelanggan dan berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik." Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling produktif dan bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan realitas yang kompleks dan memberikan wawasan tentang perspektif subjektif para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik akuntabilitas yang berlangsung di tingkat daerah serta dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik.

Selain itu, peninjauan studi literatur akan dilakukan untuk mendukung analisis dengan memperkaya pemahaman terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam birokrasi publik. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik yang telah diteliti sebelumnya. Hal ini juga akan membantu dalam memahami konteks yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, serta memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang akan meliputi analisis terhadap berbagai dokumen terkait, seperti laporan keuangan daerah, peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan, serta dokumentasi lainnya yang relevan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola dan praktik-praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Analisis dokumen akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana akuntabilitas diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan

bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kinerja pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang berharga dan relevan untuk perbaikan sistem akuntabilitas di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital Dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah

Upaya integrasi akuntabilitas birokrasi publik dengan sistem digitalisasi keuangan daerah bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang selama ini menghambat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui penerapan teknologi modern seperti e-budgeting, e-audit, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pengelolaan keuangan publik secara manual selama bertahun-tahun seringkali membuka celah terjadinya kesalahan administratif, korupsi, dan ketidaktepatan dalam alokasi anggaran. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam sistem keuangan daerah menjadi langkah krusial yang diambil pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, responsif, dan transparan.

Implementasi e-budgeting adalah salah satu aspek penting dalam sistem digitalisasi ini. E-budgeting tidak hanya memfasilitasi proses penganggaran secara elektronik tetapi juga meningkatkan ketepatan data dan mengurangi kesalahan manual. Teknologi ini memudahkan pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang sebelumnya sering terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan berlapis-lapis. Dalam konteks ini, e-budgeting memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi dan memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Di beberapa wilayah seperti Surakarta dan Surabaya, implementasi e-budgeting berhasil mendatangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus meningkatkan reputasi daerah dalam hal pengelolaan anggaran.

Namun, manfaat utama dari penerapan e-budgeting tidak hanya terkait dengan peningkatan efisiensi proses penganggaran, tetapi juga pada keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Melalui platform online yang menyediakan data transparan mengenai alokasi dan penggunaan dana publik, masyarakat dapat langsung memantau proses keuangan pemerintah daerah. Hal ini meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan dan mendorong akuntabilitas yang lebih kuat dari para pejabat daerah. Dengan keterbukaan ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Selain e-budgeting, sistem e-audit juga memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. E-audit menggunakan teknologi untuk memantau dan mereview aktivitas keuangan secara real-time, yang memungkinkan deteksi dini atas potensi korupsi dan penyimpangan keuangan. Di kota seperti Bandung, implementasi e-audit telah membantu meningkatkan transparansi transaksi keuangan dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Keberhasilan e-audit dalam memonitor aktivitas keuangan secara langsung tidak hanya memberikan keyakinan kepada masyarakat akan kemampuan pemerintah mengelola anggaran, tetapi juga menempatkan pihak berwenang di bawah pengawasan yang lebih ketat, sehingga meningkatkan akuntabilitas mereka.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan elemen lain yang mendukung integrasi sistem digitalisasi keuangan. SIKD menghubungkan berbagai instansi pemerintahan dan memungkinkan penyusunan anggaran secara online yang lebih efisien dan terintegrasi. Integrasi ini penting karena memastikan bahwa data keuangan selalu tersedia secara real-time dan terupdate, sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pelaporan anggaran. Dengan adanya SIKD, pemerintah daerah dapat merespons permintaan informasi publik dengan lebih cepat dan akurat, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antar lembaga dalam pengelolaan anggaran.

Namun, adopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari tantangan yang signifikan. Resistensi dari birokrasi, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta rendahnya literasi digital di kalangan pejabat pemerintah menjadi penghambat utama dalam penerapan e-budgeting, e-audit, dan SIKD secara efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, teknologi ini tidak akan mencapai potensi penuhnya dan risiko terjadinya kesalahan dalam implementasi akan tetap tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur digital dan melaksanakan program pelatihan serta sosialisasi kepada pejabat daerah. Kampanye edukasi yang menyeluruh juga penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, digitalisasi keuangan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pelayanan publik.



Integrasi sistem digitalisasi keuangan daerah dengan akuntabilitas birokrasi publik merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi tata kelola keuangan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan implementasi teknologi yang tepat dan dukungan SDM yang memadai, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Transfer Daerah Dan Ketimpangan Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer daerah merupakan elemen penting yang sangat memengaruhi kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah dengan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa merupakan instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah-daerah. Namun, sering kali pengelolaan dana ini tidak dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakefisienan penggunaan dana, penyimpangan, hingga kesenjangan pelayanan publik antara daerah kaya dan miskin.

Dalam konteks pengelolaan dana transfer, aspek akuntabilitas memainkan peran kunci. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, alokasi dana transfer dapat dengan mudah disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Misalnya, dalam kasus Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), meskipun secara teoritis dana ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas daerah, dalam praktiknya sering terjadi ketidaktepatan alokasi dan penggunaan. Penggunaan dana ini tidak jarang mengalami pemborosan atau bahkan dikorupsi akibat kurangnya transparansi dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik justru tidak mampu memenuhi target yang diharapkan.

Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan dana transfer daerah telah lama menjadi sorotan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah dana yang mengendap di rekening pemerintah daerah tanpa dimanfaatkan secara optimal. Data empiris menunjukkan bahwa dana yang mengendap di rekening Pemda di seluruh Indonesia dalam bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun pada periode 2019 hingga 2021. Kondisi ini menandakan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah tidak terserap dengan baik, mencerminkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi ini berdampak pada ketimpangan kinerja pelayanan publik antar daerah. Daerah-daerah yang lebih kaya cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan manajemen yang lebih baik, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih miskin. Ketika dana transfer tidak digunakan secara efektif, daerah miskin yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut malah semakin tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini memperburuk ketimpangan antar daerah dan melemahkan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan reformasi dalam pengelolaan dana transfer daerah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), misalnya, dapat membantu memantau penggunaan dana secara real-time dan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengelolaan dana dapat dipantau dengan lebih mudah, sehingga meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dana.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa dana transfer digunakan secara tepat dan efisien. Dengan akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan penggunaan dana publik, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya membantu memperkuat sistem akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. Pentingnya sinergi antar institusi dalam meningkatkan akuntabilitas juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan dana transfer. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan di setiap daerah.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer daerah sangat penting untuk mengurangi ketimpangan kinerja pelayanan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat, pengelolaan dana transfer daerah dapat

dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan yang lebih merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia.

Peran Akuntabilitas Partisipatif Dalam Reformasi Keuangan Daerah Dalam Membangun Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan

Reformasi keuangan daerah di Indonesia telah menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses ini bukan hanya penting, melainkan juga esensial untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif dan efisien. Dalam konteks reformasi ini, akuntabilitas partisipatif memainkan peran sebagai katalisator utama yang mendorong perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan daerah, merupakan bentuk nyata dari transparansi yang mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Definisi partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan langsung terjadi ketika masyarakat diundang untuk ikut serta dalam rapat-rapat pleno terkait APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), di mana mereka dapat memantau proses pelaksanaan anggaran secara real-time. Sebaliknya, partisipasi tidak langsung dapat diwujudkan melalui keanggotaan masyarakat dalam komite-komite pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Keberadaan mekanisme partisipatif ini juga dijamin oleh konstitusi, terutama dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menjamin hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi akuntabilitas partisipatif telah mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang terlihat di Desa Doro'Oo, di mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dalam kasus ini, masyarakat secara sukarela ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Keberhasilan implementasi tersebut ditandai dengan peningkatan transparansi pelaksanaan anggaran serta adanya pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Masyarakat di Desa Doro'Oo dapat secara langsung melihat hasil dari partisipasi mereka, yang memberikan kepercayaan lebih besar terhadap pemerintah daerah dan proses penganggaran yang berjalan.

Meskipun demikian, belum semua daerah mampu mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi antara lain adalah kurangnya ruang komunikasi publik yang efektif. Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara untuk melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peran mereka dalam pengawasan keuangan desa menjadi terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu menyediakan saluran komunikasi yang lebih inklusif, seperti forum-forum diskusi atau media online, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan serta memberikan masukan dan feedback terkait pengelolaan keuangan desa.

Di samping itu, pemberian insentif dan disinsentif menjadi mekanisme penting yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pejabat publik yang berhasil mendorong partisipasi masyarakat perlu mendapatkan insentif sebagai bentuk apresiasi, sedangkan disinsentif harus diberikan kepada mereka yang menghalangi partisipasi publik. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Insentif ini juga akan memotivasi pejabat untuk berinovasi dalam mengembangkan ruang-ruang partisipatif dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan anggaran.

Transparansi dan akses informasi publik juga merupakan elemen kunci yang mendukung keberhasilan akuntabilitas partisipatif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran disediakan secara terbuka melalui platform online yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memantau kegiatan keuangan daerah secara real-time, memberikan kritik yang konstruktif, dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak berwenang. Transparansi ini juga memberikan kontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kepentingan publik.

Untuk meningkatkan efektivitas reformasi keuangan daerah, pemerintah harus menerapkan solusi kebijakan yang lebih inklusif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Implementasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) memungkinkan pemantauan penggunaan anggaran secara real-time dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Di



samping itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah desa, seperti penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pengawasan, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Reformasi keuangan daerah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dengan adanya akuntabilitas partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung melalui rapat pleno maupun tidak langsung melalui komite pengawasan, telah terbukti menjadi elemen penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dalam beberapa daerah, implementasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah telah membawa dampak positif, namun masih terdapat hambatan, seperti kurangnya akses informasi dan ruang komunikasi publik yang memadai.

Pentingnya akuntabilitas partisipatif tidak hanya terletak pada pengawasan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Untuk memaksimalkan efektivitas partisipasi masyarakat, dibutuhkan transparansi yang lebih besar, penyediaan informasi yang terbuka, serta pemberian insentif yang memotivasi pejabat publik untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang inklusif dan berbasis teknologi, akuntabilitas partisipatif dapat lebih efektif dalam mendukung keberhasilan reformasi keuangan daerah di masa depan.

Saran

1. Peningkatan Akses Informasi Publik: Pemerintah daerah perlu menyediakan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga informasi tentang anggaran dan pelaksanaan pembangunan dapat diperoleh secara transparan dan real-time.
2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara rutin terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pengawasan anggaran, agar partisipasi mereka dapat lebih optimal.
3. Pemberian Insentif kepada Pejabat Publik: Pemerintah harus menerapkan mekanisme insentif bagi pejabat yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta memberikan sanksi kepada yang menghalangi keterlibatan publik.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Implementasi sistem seperti SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) perlu ditingkatkan untuk mempermudah masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money dan Pengawasan terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. *KINDAI*, 17(3), 438-445.
- Agustin, R., & Dwiningwarni, S. S. (2023). Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280-286.
- Asyikin, J. (2021). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, Transparansi dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 92-106.
- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(3).
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2).
- Laga, Y. M. V. I. (2021). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

- Lubis, L. A., & Nasution, M. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padangsidempuan. *Journal Of Science And Social Research*, 6(2), 524-530.
- Mandasari, Y. E., Darajat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10279-10287.
- Meme, M. E., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik: Bagaimana Engaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1).
- Trilaksono, B. A., & Handayani, N. (2020). Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).